

Jabar Wacanakan Beri Bansos dengan Syarat Kartu Vaksin

BANDUNG (IM) - Pemprov Jabar terus menggenjot capaian vaksinasi Covid-19. Upaya tersebut dilakukan karena target vaksinasi harian Jawa Barat dirasakan terus menurun.

Kepala Divisi Percepatan Vaksinasi Covid-19 Jabar, Dedi Supandi mengatakan biasanya target vaksinasi per hari mencapai 400 ribu. Saat ini turun menjadi 160 ribu per hari.

"Vaksin kita surplus 2 juta dosis. Karena kita kekurangan target atau orang yang mau divaksin," ujar Dedi, Rabu (8/12).

Dedi mengatakan, saat ini di daerah terutama di desa-desa, sudah sulit untuk mencari warga yang mau divaksin. Salah satu penyebabnya, karena warga di daerah banyak yang tak punya KTP sebagai syarat vaksinasi.

"Puskesmas pun menolak warga yang mau divaksin kalau tidak ada KTP. Karena, Puskesmas juga percuma kalau memvaksin tak ada NIK-nya. Termasuk lansia, tidak

divaksin padahal mereka ingin vaksin tapi tak punya NIK juga," paparnya.

Dedi mewacanakan penggunaan sertifikat vaksin sebagai salah satu syarat bagi warga agar bisa menerima Bansos Covid-19. "Nanti syarat warga bisa menerima Bansos kalau menunjukkan kartu vaksin," katanya.

Total distribusi vaksin Covid-19 yang diterima Jabar 53,3 juta dosis vaksin. Realisasinya mencapai 43,5 juta dosis vaksin. "Per 6 Desember, dosis pertama vaksin di Jabar 66,72 persen. Sedangkan dosis kedua 47,64 persen," katanya.

Jawa Barat juga masih berupaya mempercepat capaian vaksinasi dengan menggandeng pihak swasta. Termasuk menggerakkan badan-badan di desa. "Untuk badan desa saat ini ada 12.500 dan yang dapat memvaksin itu ada 9.600 orang. Kalau saja 30 orang divaksin setiap harinya oleh 9.600 badan desa capai vaksinasi di Jabar akan kembali meningkat," paparnya. ● **pur**

JADI TERSANGKA KASUS KDRT

Oknum Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Hanya Wajib Lapor

TANGERANG (IM) - Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang melibatkan oknum Anggota DPRD Kabupaten Tangerang yang berinisial RGS masih terus dialami oleh pihak kepolisian.

Walau sudah ditetapkan sebagai tersangka, polisi tidak melakukan penanganan terhadap RGS. Namun tersangka yang merupakan politisi Partai Gerindra ini dikenakan wajib lapor sambil menunggu proses penyelidikan selanjutnya.

Kapolres Kota Tangerang, Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro mengatakan, tidak ditahannya RGS lantaran yang bersangkutan bersikap kooperatif terhadap pihak kepolisian.

Namun, RGS diharuskan wajib lapor setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Kota Tangerang. "RGS sedang dalam proses pemberkasan, saat ini yang bersangkutan sudah menjalankan wajib lapor,"

Sesuai Pasal 21 KUHP,

lanjutnya, menjelaskan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal ini yaitu adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

"Kita serahkan semua pada keputusan penyidik. Dengan pertimbangan pasal 21 KUHP tersebut penyidik bisa melakukan penahanan dan tidak melakukan penahanan," ujar Wahyu, kemarin.

Sementara itu, diketahui, Badan Kehormatan Dewan (BKD) Kabupaten Tangerang, Ketua BKD, Hidayatullah menjelaskan, pihaknya sudah menyurati pihak RGS untuk dilakukan pemanggilan. Hanya saja, yang bersangkutan belum memenuhi panggilan. ● **pp**



CURAH KOBOKAN GUNUNG SEMERU

Kondisi rumah warga yang rusak akibat awan panas guguran Gunung Semeru di Dusun Curah Kobokan, Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur, Rabu (8/12). Dusun Curah Kobokan merupakan salah satu lokasi terparah terdampak awan panas guguran Gunung Semeru dan salah satu dusun terdekat dengan kawah Gunung Semeru.

Disdik Kota Tangsel Berlakukakan PJJ selama Nataru 2022

Kegiatan belajar mengajar dengan metode PJJ akan berlangsung sejak 20 - 31 Desember 2021 dan wajib diikuti oleh peserta didik mulai dari tingkat pendidikan PAUD hingga SMA yang ada di Kota Tangsel.

TANGSEL (IM) - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyatakan akan tetap mengadakan proses belajar mengajar selama perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022 dengan menerapkan proses belajar mengajar jarak jauh (PJJ).

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, Taryono saat dihubungi, Rabu (8/12). "Berdasarkan surat edaran nomor 422.3/7041-Disdikbud tentang penyelenggaraan pembelajaran jalur Nataru 2022 dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 maka kami akan tetap menyelenggarakan proses belajar mengajar meski dengan menggunakan metode daring dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ)," ungkap Taryono.

Proses PJJ diambil untuk menekan mobilitas masyarakat pada saat Nataru meski pemerintah membatalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3.

"Kegiatan belajar mengajar dengan metode PJJ akan berlangsung sejak 20 - 31 Desember 2021 dan wajib diikuti oleh peserta didik mulai dari tingkat pendidikan PAUD hingga SMA yang ada di Kota

Tangsel. Sedangkan libur semester ganjil TA 2021/2022 akan baru berlangsung sejak 3-15 Januari 2022," lanjut Taryono.

Sejatinnya proses pembelajaran semester Ganjil TA 2021/2022 sudah berakhir sejak pertengahan Desember 2021 ini.

Namun proses pembagian raport baru akan berlangsung sesuai libur.

"Pembagian raportnya akan berlangsung 21 - 22 Januari 2022 atau sesuai libur semester Ganjil. Dan saya juga tetap ingatkan agar guru dan tenaga pendidik agar tidak izin libur dan cuti selama pemberlakuan PJJ. Dan diimbau agar siswa di-

dik juga untuk tidak bepergian selama masa Nataru 2022," lanjutnya.

Sementara itu, salah seorang guru di salah satu sekolah di Tangsel mengaku khawatir dengan pelaksanaan PJJ selama Nataru, lantaran siswa bisa saja keluar kota dan menjalani pembelajaran dari lokasi mereka di luar kota.

"Maka itu kita berharap adanya aturan siswa agar juga tidak keluar kota dari pemerintah untuk mencegah mereka menjalani PJJ dari luar kota. Dan kita juga berharap orang tuanya juga mengerti semua ini dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19," tandasnya. ● **pp**

Warga di Pegunungan Lebak Diminta Waspada Longsor

LEBAK (IM) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan dan perbukitan dapat mewaspadai bencana longsor menyusul curah hujan malam hingga dini hari cenderung meningkat.

"Peringatan kewaspadaan itu guna mengurangi risiko kebencanaan sehingga tidak menimbulkan korban jiwa," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak, Febby Rizky Pratama di Lebak, kemarin.

Masyarakat Kabupaten Lebak yang tinggal di sekitar kaki Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dapat meningkatkan kewaspadaan potensi bencana longsor.

Sebab, di daerah itu rawan longsor jika curah hujan meningkat, bahkan tahun 2020 tercatat sembilan orang meninggal dunia.

Mereka warga yang meninggal dunia itu warga Kecamatan Lebak Gedong, karena

na lokasinya berada di kaki TNGHS.

"Kami minta jika curah hujan berlangsung malam hingga dini hari dengan intensitas ringan dan sedang disertai angin kencang, sebaiknya warga waspada ancaman bencana alam," katanya menjelaskan.

Menurut dia, masyarakat Kabupaten Lebak yang tinggal di wilayah pegunungan dan perbukitan berjumlah ribuan.

Mereka kebanyakan tersebar di permukiman kaki TNGHS, seperti Kecamatan Lebak Gedong, Cipanas, Muncang, Cirinten, Leuwidamar, Cigembong, Panggarangan, Bayah, Cibeber, Ciligrang, Sobang, dan Muncang.

Untuk itu, BPBD Lebak meminta relawan juga aparat kecamatan dan desa/keurahan agar meningkatkan kewaspadaan bencana alam itu.

"Kami khawatir bencana longsor itu menimpa masyarakat yang tinggal di perbukitan dan pegunungan," katanya. ● **pra**

Pria di Tangerang Paksa Pacar Lagi Hamil Open BO di Kosan

TANGERANG (IM) - Seorang pria berinisial AD (21), ditangkap polisi karena membuka prostitusi di kamar kos di Balaraja, Kabupaten Tangerang. Ironisnya, pelaku memaksa pacarnya untuk open BO (booking online).

Kasus ini terungkap setelah polisi melakukan operasi pekat pada Sabtu (4/12) lalu. Pelaku ditangkap setelah polisi mendapat informasi bahwa pelaku membuka tempat prostitusi di kamar kosnya.

"Ini kegiatan operasi pekat indeks AD diduga jadi tempat prostitusi open booking out (BO). Kami telah menetapkan AD sebagai tersangka dalam perkara prostitusi online," ujar Kapolsek Balaraja, Kompol Gede Prasetya saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (8/12).

Parahnya, prostitusi online yang dilakukan AD dengan memasarkan kekasihnya yang berusia 25 tahun. AD menjual

korban melalui aplikasi Michat kepada hidung belang.

"Perempuan IY diketahui sebagai pacar tersangka AD yang sengaja dijajakan lewat aplikasi Michat kepada memaksa pacarnya untuk open BO. Hasil uang yang didapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersangka AD," tambah Gede.

Gede menjelaskan AD menjual pacarnya ini dalam kondisi sedang hamil lima bulan. Menurutnya kehamilan ini atas hasil hubungan gelap korban dengan AD.

"Betul korban tengah hamil dari hubungannya dengan tersangka," tuturnya.

Atas perbuatannya, AD ditahan di Mapolsek Balaraja. AD dijerat Pasal 296 KUHP dan/atau Pasal 506 KUHP dan/atau Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. ● **pp**

Tuntut Revisi UMK 2022, Ribuan Buruh Banten Kembali Unjuk Rasa

TANGERANG (IM) - Ribuan buruh dari beberapa Serikat Buruh yang ada di wilayah Tangerang Raya dan Banten Rabu (8/12) bergerak ke dua lokasi yakni Istana Negara Jakarta dan Kantor Pemerintahan Provinsi Banten untuk menggelar demo dan meminta pemerintah

untuk menaikkan upah minimum tahun 2022 yang dianggap mereka terlalu rendah.

Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), yang juga presidium Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3), Maman Nuriman meminta Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Republik Indonesia merevisi SK kenaikan UMK tahun 2022 menjadi sebesar 5,4% untuk seluruh Kota dan Kabupaten se-Provinsi Banten.

"Kita yang pasti menuntut keras ucapan tersebut karena memperlihatkan dengan jelas bahwa rezim hari ini semakin menunjukkan keberpihakannya kepada kepentingan modal, dan tidak berpihak kepada rakyat mayoritas, termasuk kaum buruh.

Selain itu, kami juga menuntut pemerintah meng-

hapus seluruh Peraturan turunan (PP 34, PP 35, PP 36, dan PP 37) tahun 2021 yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja sesuai dengan Amar Putusan MK Poin 7," ujar Maman ketika dihubungi, Rabu (8/12).

Dalam kesempatan itu, Maman juga menuntut keras pernyataan Gubernur Wahidin Halim terkait demo yang dilakukan buruh dengan mengatakan bahwa pengusaha bisa cari karyawan baru bila memang buruh yang sekarang tidak mau menerima keputusan pemerintah tentang upah tahun 2022 yang sudah ditetapkan pemerintah.

"Kita yang pasti menuntut keras ucapan tersebut karena memperlihatkan dengan jelas bahwa rezim hari ini semakin menunjukkan keberpihakannya kepada kepentingan modal, dan tidak berpihak kepada rakyat mayoritas, termasuk kaum buruh.

Selain itu, kami juga menuntut pemerintah meng-

hapus seluruh Peraturan turunan (PP 34, PP 35, PP 36, dan PP 37) tahun 2021 yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja sesuai dengan Amar Putusan MK Poin 7," ujar Maman ketika dihubungi, Rabu (8/12).

Dalam kesempatan ini, Maman juga berharap penetapan upah bagi buruh tidak dijadikan komoditas politik dan kepentingan.

Lantaran akibat hal tersebut membuat buruh semakin tersudut dan hidup dengan tidak layak.

"Kita berharap Pemerintah mendengar aspirasi kita, karena kita berharap buruh bisa hidup dengan layak. Saat demo ini, kita juga akan menyuarakan pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja," terangnya.

Aksi buruh yang dilangsungkan hari ini dijaga oleh tim petugas gabungan yang berjumlah 251 personel yang ditempatkan di beberapa titik yang dilintasi massa pendemo. ● **pp**



GREBEG VAKSIN DARI RUMAH KE RUMAH

Petugas menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada warga di rumahnya saat Grebeg Vaksin dari rumah ke rumah di Losarang, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (8/12). Grebeg Vaksin yang dilaksanakan Puskesmas dan Polsek Losarang itu untuk mengejar pencapaian target vaksinasi kabupaten hingga 70 persen pada Desember tahun ini.



PENATAAN FASILITAS PUBLIK DI BANDUNG
Dua hansip melintas di samping Patung Tentara Pelajar yang menjadi kawasan penataan fasilitas publik di Jalan Viaduct, Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/12). Pemerintah Kota Bandung melakukan penataan fasilitas publik di beberapa kawasan guna memberikan kenyamanan pada masyarakat sekaligus mewujudkan Kota Bandung sebagai kota ramah, indah dan nyaman.

JELANG AKHIR TAHUN

Pemkot Tangerang Tingkatkan Vaksinasi dan 3T

TANGERANG (IM) - Pemerintah Kota Tangerang, Banten, meningkatkan vaksinasi Covid-19 dan testing, penelusuran dan perawatan (3T) menjelang akhir tahun 2021 dalam mencapai target pembentukan kekebalan kelompok dan antisipasi lonjakan kasus infeksi virus korona.

Ia mengatakan Dinkes saat ini terus melakukan sosialisasi mengenai penerapan prokes 5M, pelaksanaan 3T dan mengencarkan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat.

Khusus untuk pelaksanaan 3T, Dinkes saat ini sedang melakukan surveilans kepada pegawai yang mewakili masyarakat dalam mencari kasus baru Covid-19.

Harapannya dapat dicegah sedini mungkin dan dilakukan pemetaan agar penyebaran Covid-19 dapat ditekan. Apalagi saat ini kasus Covid-19 terus mengalami penurunan.

"Kewaspadaan bersama dengan menerapkan prokes maka itu kita selalu keluarkan imbauan agar disiplin prokes dan menjalankan imbauan yang diberikan seperti vaksinasi," kata dia. ● **pp**